

# Wabup Kasta Pimpin Rapat Persiapan Pemeriksaan BPK



Wabup Klungkung Made Kasta saat memimpin persiapan pemeriksaan BPK di Ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (4/2).

SEMARAPURA, NusaBali  
Wakil Bupati (Wabup) Klungkung I Made Kasta memimpin rapat pembahasan persiapan pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan) BPK yang melibatkan perangkat daerah dan perangkat

desa se-Kecamatan Klungkung. Acara tersebut bertempat di Ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, Senin (4/2).

Hadir Sekda Klungkung Gde Putu Winastra, Kepala Inspektorat Klungkung I Made Seger serta para pimpinan OPD. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta mengatakan, kepada seluruh perangkat daerah maupun perangkat desa untuk memahami aturan-aturan yang sudah berlaku. Sehingga nantinya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tupoksi masing-masing unit. "Pahami aturan-aturan yang sudah berlaku, yang paling

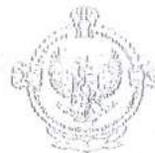
utama jangan ada instansi yang melanggar aturan yang sudah ditentukan," ujarnya

Tak hanya itu saja, Wabup Kasta juga mengingatkan agar terlebih dahulu menyiapkan data-data agar bisa berargumentasi dengan baik saat nantinya BPK turun. Selain itu, kerjasama yang baik antara pimpinan dengan bawahan harus terjalin dengan baik. "Komunikasi, koordinasi dan konsultasi di dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi di masing-masing unit harus terus dijaga dengan sebaik-baiknya," harapnya.

Kepala Inspektorat Klungkung I Made Seger menyampaikan tujuan dari rapat tersebut yakni untuk memberikan

pemahaman kepada masing-masing perangkat daerah maupun perangkat desa agar bisa menjalankan tugas maupun program-program sesuai aturan yang berlaku. "Apapun nantinya program-program yang sudah berjalan maupun yang baru dirancang agar bisa menyesuaikan dengan aturan yang sudah berlaku," ungkapnya.

Lebih lanjut, Made Seger menambahkan agar penghargaan yang sudah Pemkab Klungkung raih agar bisa dipertahanan atau bisa ditingkatkan. "Mari menjalankan tugas secara tulus ikhlas agar pekerjaan yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik," harapnya. **wan**



## Oknum Satpol PP Pungli Dinonjobkan

**Oknum Kasubag Satpol PP yang tertangkap Satgas Saber Pungli dinonjobkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Jembrana. Sedangkan seorang lagi dipindahtugaskan ke Seksi Damkar.**

NEGARA, NusaBali

Oknum Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Jembrana, I Komang Putra Astika, 47, yang melakukan pungli terhadap penduduk pendatang (duktang) beberapa waktu lalu, secara resmi dinonjobkan

atau dibebaskan dari jabatan, dan dipindahtugaskan sebagai pegawai Dinas Arsip dan Perpustakaan Jembrana, Senin (4/2). Sementara rekannya, anggota Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Jembrana, I Nyoman Darmada, 54, diberikan sanksi

berupa penurunan pangkat, dan dipindahtugaskan sebagai anggota Seksi Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) Satpol PP Jembrana.

Bupati Jembrana I Putu Artha, mengatakan kedua oknum Satpol PP yang berstatus PNS itu sama-sama diganjar sanksi hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Keduanya terbukti melakukan pungli sehingga dinilai pantas mendapat hukuman disiplin berat tersebut. "Yang oknum kasubag dinonjobkan menjadi staf di perpustakaan. Sedangkan satunya yang me-

mang staf, kami turunkan pangkatnya, dan dia kami pindahkan ke anggota pemadam. Memang masih di bawah Satpol PP, tetapi tidak lagi menjadi anggota Pol PP," ujar Bupati Artha, yang juga didampingi Sekda Jembrana Made Sudiada, Senin (4/2).

Menurut Bupati Artha, sanksi berupa nonjob terhadap oknum kasubag serta penurunan pangkat terhadap oknum anggota Pol PP yang juga sama-sama dipindahtugaskan, itu sebenarnya masih termasuk sanksi hukuman disiplin berat kategori sedang. Mereka masih beruntung tidak sampai diproses pidana oleh Polres Jembrana, sehingga

tidak sampai menerima ganjaran sanksi hukuman disiplin berat kategori yang paling berat, yakni berupa pemecatan sebagai PNS. "Ini masih untung diserahkan ke kami. Kalau diproses hukum, mereka bisa termasuk melakukan korupsi, dan pasti akan dipecat," tegasnya.

Sesuai catatan, kasus pungli melibatkan dua oknum Satpol PP Jembrana tersebut merupakan kasus pungli ketiga melibatkan oknum Satpol PP Jembrana yang diungkap jajaran Kelompok Kerja (Pokja) Penindakan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jembrana dari Polres Jembrana.

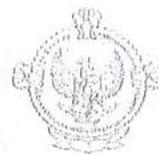
Dua kasus sebelumnya, pada Februari 2017 dan Januari 2018 lalu, masing-masing ditangkap 3 oknum Satpol PP yang diduga melakukan pungli di Pos KTP Gilimanuk. Mengenai hal tersebut, Bupati Artha meminta Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Jembrana untuk meningkatkan pembinaan jajaran di Satpol PP, dan diharapkan pungli beberapa waktu lalu, menjadi kejadian yang terakhir. "Nanti kalau masih ada lagi, sanksinya bisa naik ke kasat-nya," ungkap Bupati Artha.

Sementara Kasatpol PP Jembrana I Gusti Ngurah Rai Budhi, yang mendampingi Bupati Artha, mengaku siap menerima

sanksi pimpinan, ketika dinilai tidak bisa melakukan pembinaan terhadap jajarannya. Namun menurutnya pembinaan sudah terus dilakukan. Termasuk mengkhhusus terhadap sang oknum Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Jembrana I Komang Putra Astika alias Kelemong, yang sebelumnya memang ditengarai memiliki track record buruk. Namun dalam melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan, dia tidak sampai membuat pernyataan secara tertulis, karena mempertimbangkan yang bersangkutan telah dewasa. **ode**

Edisi : Rabu, 6 Februari 2019

Hal : 7



## Jadi Tersangka Korupsi Dana Pembangunan Kantor Desa **Perbekel Celukan Bawang Terancam Diberhentikan**

**Ketentuan Permendagri dan Perda memungkinkan perbekel yang tersangkut masalah hukum bisa diberhentikan sementara.**

SINGARAJA, NusaBali  
Perbekel Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Muhammad Ashari, kini diusulkan diberhentikan sementara,

menyusul statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang Tahun 2014. Usulan itu disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Buleleng setelah melakukan telaahan terhadap kasus yang menyeret Perbekel Ashari.

Dinas PMD dalam telaahannya menyebut, berdasar ketentuan hukum Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pen-

angkatan Perbekel, dimana disebutkan kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. "Sesuai Perda tentang tata cara pemilihan, pelantikan dan pengangkatan perbekel, maka perbekel dapat diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka kasus korupsi," kata Kepala Dinas PMD, I Made Subur, Jumat (1/2).

Berdasarkan telaahan tersebut, Subur mengaku telah mengajukan usulan pemberhentian sementara Perbekel Ashari kepada Bupati Buleleng, Putu

Agus Suradnyana. "Kami sudah ajukan telaahannya yang berisi usulan pemberhentian itu, kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana. Kami sudah ajukan telaahannya yang berisi usulan pemberhentian itu, karena Perbekel Celukan Bawang telah memenuhi syarat diberhentikan sementara karena sudah berstatus sebagai tersangka," jelasnya.

Sementara Bupati Putu Agus Suradnyana dikonfirmasi, mengaku belum sempat membaca telaahan dari Dinas PMD menyangkut usulan pemberhentian sementara Perbekel Celukan Bawang. Meski demikian Bupati men-

egaskan, dalam kasus tersebut semua pihak harus taat dengan hukum, dan Pemkab Buleleng sendiri akan mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. "Yang jelas, proses hukum dan mekanismenya harus berjalan dengan benar. Kami akan ikuti proses dan mekanisme yang ada," ujarnya.

Perbekel Celukan Bawang Muhammad Ashari ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Januari 2019 lalu. Kasus yang membelit Perbekel Ashari bermula ketika pihak PLTU Celukang Bawang yakni PT General Energi Bali (GEB), membayarkan dana ganti rugi bangunan Kantor Desa, sekitar

tahun 2014 silam. Pembayaran dana ganti rugi itu, karena lahan dan bangunan Kantor Desa Celukan Bawang di Dusun Punggukan, ikut dibebaskan oleh PT GEB sebagai areal pembangkit listrik.

Untuk lahan, pihak PT GEB telah membelikan lahan di Dusun Celukan Bawang dengan luasan yang sama dengan luasan kantor desa sebelumnya. Sedangkan untuk bangunan kantor desa, PT GEB memberikan dana ganti rugi. Konon, besaran dana ganti rugi bangunan kantor desa itu sekitar Rp 1,2 miliar. Dana ganti rugi itu dibayarkan PT GEB melalui rekening Ashari.

Dana tersebut dipakai membangun kantor desa. Hanya saja, dalam pembangunan itu, tidak melalui proses tender di unit layanan pengadaan (ULP) barang dan jasa. Kabarnya, Perbekel Ashari menunjuk langsung rekanan yang disebut-sebut bernama CV Hikmah Lagas. Selain gedung kantor desa, CV Hikmah Lagas juga ditunjuk

mengerjakan pagar kantor desa tanpa proses tender. Selain kejanggalan tersebut, tim Kejari Buleleng juga menilai kedua proyek tersebut tidak sampai sebesar Rp 1 miliar. Akibat perbuatan, total kerugian negara ditaksir sebesar Rp 295.525.990. **k19**



## Rp 2,8 Miliar untuk Bangun 4 IPAL Komunal

### ● PUPR Sasar Daerah Lain di Karangasem

#### AMLAPURA, TRIBUN BALI

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karangasem akan membangun empat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal tahun ini. Pembangunan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian PUPR.

Kabid Persampahan dan Penyehatan Lingkungan PUPR, Gusti Lanang Suyadnya, menjelaskan, 4 IPAL komunal rencana dibangun di Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kelurahan Subagan, Kelurahan Karangasem, dan sisanya di Kecamatan Karangasem.

"Pembangunan 4 IPAL Komunal anggarannya sekitar 2,8 Miliar dari DAK Kementerian PUPR. Dalam waktu dekat akan segera direalisasikan demi kepen-

tingan warga," jelas Gusti Lanang Suyadnya, Selasa (5/2).

Satu unit IPAL cukup untuk 50 sampai 100 KK. Tujuannya untuk penyehatan lingkungan di sekitar pemukiman sehingga tak ada limbah berserakan. Program ini pun terkait dengan program seratus kosong seratus yang dirancang oleh Presiden Joko Widodo.

"Tahun ini pemerintah daerah juga menganggarkan Rp 200 juta untuk menyambungkan sekitar 25 KK ke IPAL komunal. Nanti dana ini akan diganti dengan dana hibah SAIG," jelas Gusti Lanang, yang juga menjadi anggota PHRI Karangasem.

Program yang dimulai tahun 2006 ini baru menyisir sekitar Kecamatan Karangasem dan Bebandem. Setelah

ini, pemerintah daerah akan menyisir daerah lainnya yakni Kecamatan Rendang, Abang, Selat, Sideman, dan Kecamatan Manggis, serta Kubu.

Sebelumnya, pemerintah telah membangun IPAL komunal di Lebah Sari, Bungaya, Kecamatan Bebandem, Ampel Kelurahan Karangasem, Beji Desa Pertama, dan Genteng Kelurahan Subagan. IPAL telah diserahkan ke Kelompok Penerima Manfaat (KPM).

"Saat ini kita sudah bangun 21 IPAL Komunal di Kecamatan Karangasem dan Bebandem. Kemarin, pemerintah telah menyerahkan 4 IPAL komunal ke KPM. Nanti kelompok yang akan memelihara, sedangkan pengelolaannya di-handel Dinas PUPR," tambahnya. (ful)

Edisi : Rabu, 16 Feb 2019

Hal : 5



# Retribusi Pasar Hanya Capai 1,6 Miliar

● Banyak Persoalan Sejak Serah Terima Hak Pengelolaan

**NEGARA, TRIBUN BALI** - Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana, sejak awal tahun 2018 lalu mengelola retribusi pasar di Jembrana. Ternyata hasilnya belum cukup signifikan sejak pengelolaan pasar itu diserahkan oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Jembrana. Hingga saat ini, tercatat hanya Rp 1,6 Miliar pendapatan dari target sebesar Rp 3,5 Miliar yang masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana, I Made Gede Budhiarta menyatakan, pihaknya baru satu tahun mengelola sejak berakhirnya MoU Bupati Jembrana dengan Perusda dan setelah adanya rekomendasi DPRD Kabupaten Jembrana.

Tahun 2018 target PAD dari retribusi pasar sebesar Rp 3,5 Miliar, namun hanya Rp 1,6 Miliar yang tercapai. Menurut Budhiarta hal ini terkait dengan cara pengelolaan. Di mana, sambungannya, Perusda menitik beratkan *profit oriented*, tapi Diskoperindag pengelolaannya lebih pada pelayanan.

"Bagaimana kami meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik itu

Jadi kami benahi dari segi fisik, tata kelola, dan regulasi

**I Made Gede Budhiarta**

Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Jembrana

pedagang maupun pembeli sehingga ujung-ujungnya bisa meningkatkan PAD. Itu pun nantinya," ucapnya Selasa (5/2).

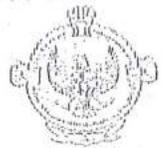
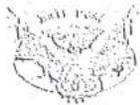
Ia menjelaskan banyak persoalan terjadi sejak serah terima pengelolaan itu termasuk perilaku dan budaya kerja. Pelimpahan pegawai juga diterima sebanyak 63 tenaga kontrak. Apalagi, pihaknya sempat menambah anggaran untuk tenaga kontrak itu pada APBD perubahan. "Jadi kami benahi dari segi fisik, tata kelola, dan regulasi," tegasnya.

Misalnya saja, ia melanjutkan, pada aspek fisik masih ada pasar yang belum direvitalisasi. Dari 10 pasar yang dikelola, sudah sembilan yang akhirnya direvitalisasi, hanya Pasar Umum Negara saja yang belum. Maka, memang pengisian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar bisa terisi pada tahun ini. Akan tetapi, struktur UPT pengisiannya tergantung *policy* atau kebijakan Bupati.

"Apalagi tahun ini kami mengarah pada pasar sehat dan tertib ukur dan tahun 2020 target akan ada 2 pasar bersNI (Standar Nasional Indonesia) yakni Pasar Tegalcangkring dan Pasar Banjar Tengah," ungkapnya.

Menurutnya belum tercapainya target retribusi pasar juga karena aspek regulasi, di mana belum selesainya revisi Perda Kabupaten Jembrana Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

"Contohnya saja begini, ya. Pedagang di pelataran tidak dapat apa, tapi bayar retribusinya sama dengan pedagang di los yang dapat fasilitas. Seharusnya beda sehingga harus dirasionalisasi," jelasnya. (ang)



## Kasus Dugaan Korupsi PNPM-MP Terdakwa Murniati Dituntut 7 Tahun, Wartini 8 Tahun

Denpasar (Bali Post) -

Dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Rendang, Karangasem, Ni Wayan Murniati alias Bebel (47) dan Ni Ketut Wartini alias Gebrod (39), Rabu (6/2) kemairn masing-masing dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan 8 tahun penjara.

Terhadap tuntutan tim jaksa, kedua terdakwa akan mengajukan pembelaan atau pledoi.

Jaksa yang dikoordinir Andri Kurniawan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Terdakwa juga didenda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 1.670.780.000. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama empat tahun. Itu untuk terdakwa Wartini.

Sementara terdakwa Murniati dituntut lebih ringan yakni tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Membayar uang pengganti sebesar Rp 292.637.000. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda maka dipidana penjara selama tiga tahun dan enam bulan. (kmb37)

Edisi : Kamis, 7 Februari 2019

Hal : 5



## Target Retribusi Pasar Rp 3,5 Miliar, Tercapai Hanya Rp 1,6 Miliar

Negara (Bali Post) -

Pendapatan retribusi dari Pasar Umum pascadiserahkan pengelolaan dari Perusahaan Daerah (Perusda) Jembrana ke Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana tahun 2018 ini masih di bawah target. Dari target Rp 3,5 miliar selama setahun, baru tercapai sekitar Rp 1,6 miliar. Banyak faktor pemicu, mulai dari fisik pasar, tata kelola dan regulasi.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Jembrana I Made Gede Budhiarta, Minggu (3/2) kemarin, mengatakan belum tercapainya target PAD dari sektor retribusi pasar ini selain baru dikelola setahun, juga pola pengelolaan di Dinas berbeda dengan Perusda. Bila sebelumnya di Perusda, lebih condong *profit oriented* (keuntungan), kini setelah pengelolaan di Dinas lebih pada pelayanan. Bagaimana pengelola meningkatkan pelayanan kepada pembeli maupun pedagang, sehingga ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diakui Budhiarta, selama dikelola setahun ini, berbagai kendala dihadapi sebab saat ini masih tahap membenahan. Mulai dari mengubah budaya dan perilaku kerja pegawai, juga membenahan fisik pasar, tata kelola serta regulasi. Sejak pelimpahan dari Perusda lalu, Dinas menampung 63 tenaga Perusda dan saat ini berstatus kontrak. Dinas juga sempat menambah anggaran untuk tenaga kontrak itu pada APBD perubahan.

Untuk kendala fisik, dari 10 pasar umum yang dikelola, baru sekitar 9 pasar yang direvitalisasi. Satu pasar yang belum itu hanya Pasar Umum Negara yang memang pasar umum terbe-

sar di Jembrana. Pihaknya berharap ada pengisian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Pasar pada tahun ini.

Selain itu faktor lain adalah terkait regulasi. Dimana masih dilakukannya revisi Perda Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa tarif yang terkait pasar seperti, kios, los dan pelataran masih kurang rasional. "Nilai retribusi hariannya sama. Seperti pedagang di pelataran, meskipun tidak dapat fasilitas apa namun pembayaran retribusinya sama dengan pedagang di los yang dapat fasilitas," terang mantan Kabag Humas dan Protokol ini. Se-



hingga, menurutnya, perlu ada penyesuaian terkait nilai retribusi ini.

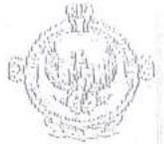
Selain itu, dari sekian pasar yang sudah berjalan, masih ada satu pasar yang belum tersentuh retribusi.

Yakni Peken Ijogading di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur. Sejak dikelola langsung oleh Dinas, para pedagang masih belum dikenai retribusi pasar. (kmb26)

**BELUM RETRIBUSI** - Salah satu pasar baru yang dibangun Pemkab Jembrana yakni Peken Ijogading hingga beberapa tahun beroperasi belum masuk regulasi untuk dikenai objek retribusi.

Edisi : Kamis, 7 Feb 2019

Hal : 4



# Tiga Pegawai LPD Tilep Rp 600 Juta

- Bomber Makesiab Lihat Buku Tabungan
- Saldo Rp 21,6 Juta Tercatat Rp 35 Ribu

**SINGARAJA, TRIBUN BALI** - Gede Suardika alias Bomber (54) benar-benar dibuat terkejut, Rabu (6/3). Pria asal Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng ini mengaku tak habis pikir uang tabungannya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sangsit, tercatat hanya berjumlah Rp 35 ribu.

Padahal ia mulai menabung di LPD sejak 2009, dan di dalam buku tabungannya, tercatat jumlah saldo semestinya mencapai Rp 21,6 juta. Hal ini ia ketahui saat ia menarik tabungan

untuk keperluan di sanggah pamerajannya.

"Saya niatnya mau ngambil tabungan. Tabungan ini bukan punya saya, tapi punya sanggah. Saya mau narik karena ada keperluan di sanggah. Tiba-tiba dikabarkan jumlah tabungan kami hanya Rp 35 ribu. Ya sayakaget. Padahal setiap nyetor, uangnya saya kasih langsung ke kasir LPD ini. Secepatnya akan saya bawa ke ranah hukum," ungkapnya dengan nada kesal.

Bomber rupanya tidak sendirian. Masih ada pu-

## Tak Mau ke Ranah Hukum

**ATAS** kejadian ini, Kepala LPD Sangsit, Ketut Rikan mengaku akan segera menyelesaikannya secara kekeluargaan. Artinya, ketiga pelaku masih diberikan kesempatan untuk segera mengganti uang milik puluhan nasabah tersebut.

"Kami sudah berkonsultasi dengan klien desa. Kalau bisa jangan sampai ke ranah hukum. Ketiganya sudah membuat surat pernyataan mengakui perbuatannya bahwa dana itu dipakai sendiri," jelasnya. (rtu)

luhan nasabah lain yang bernasib sama. Setelah diusut, rupanya uang milik nasabah dengan total nilai mencapai Rp 600 juta itu digelapkan oleh tiga pegawai LPD Sangsit.

Pegawai yang dimaksud adalah Putu M, warga asal Banjar Dinas Peken, Desa Sangsit, Kadek S (kasir LPD) warga asal Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, dan Luh JAP warga asal Banjar Dinas Abasan, Desa Sangsit.

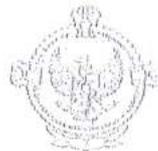
Kepala LPD Sangsit, Ketut Rikan mengatakan, ketiga perempuan itu mulai menggelapkan uang milik nasabah sejak 2017. Pihaknya pun baru menyadari perbuatan mereka pada 21 Januari 2019 saat tim LP-LPD turun melakukan audit.

"Saat dikontrol yang bersangkutan tidak memasukkan dana ke lis penabungan. Kami sebagai orang di dalam jelas tidak tahu. Setelah diselidiki kami panggil yang bersangkutan. Ternyata banyak yang digunakan. Ada yang Rp 389 juta, ada yang Rp 289 juta, ada yang Rp 54 juta begitu kira-kira," kata Rikan.

Apakah ketiga pelaku saling bekerjasama? "Putu M dan Kadek S memang saling bekerjasama. Luh JAP main sendiri, tapi idenya juga sama. Pengakuannya uang itu dipakai untuk keperluan sehari-hari. Kami masih menunggu waktu dari pak klien untuk pertemuan membahas penggelapan uang nasabah ini karena kebetulan dia sedang sibuk ada karya di segara," jawab Rikan. (rtu)

Edisi : Kamis, 7 Februari 2019

Hal : 4



## Bapenda Datangi 2 Tempat Usaha Penunggak Pajak

# Dua Tempat Usaha, Total Tunggakan Rp 3,3 M

MANGUPURA, NusaBali

Badan Pendapatan dan Pasedahan Agung Kabupaten Badung mendatangi dua tempat usaha, yakni di Seminyak, Kecamatan Kuta dan di Kecamatan Mengwi, Kamis (7/2) siang. Kedatangan Bapenda tersebut untuk memperingatkan pemilik usaha supaya segera membayar pajak. Dari dua tempat usaha tersebut, total tunggakan pajak sebesar Rp 3,3 miliar. Rinciannya, satu tempat usaha di Seminyak, Kecamatan Kuta, nunggak pajak sebesar Rp 1 miliar. Dan satu tempat usaha di Kecamatan Mengwi, nunggak sebesar Rp 2,3 miliar.

"Pada hari ini (kemarin), kami mendatangi dua tempat usaha yang telah menunggak pajak. Pertama yang kami datangi adalah restoran (di Seminyak) menunggak pajak sekitar Rp 1 miliar dari Juli 2012 hingga Februari 2019. Satu lagi, vila (di Kecamatan Mengwi) ini menunggak pajak sekitar Rp 2,3 miliar lebih dari Januari 2002 hingga Februari 2019," ungkap Kepala Bapenda Badung Made Sutama.

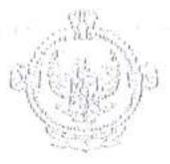
Bapenda juga memasang spanduk berwarna merah pada tempat usaha yang menunggak pajak tersebut. Intinya di spanduk tersebut bertuliskan bila objek pajak dimaksud menunggak pajak daerah. Bila selama 14 hari ke depan pemilik tidak mengindahkan, maka Bapenda akan melaku-

kan upaya penagihan paksa.

Sutama mengatakan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak (WP) dan sekaligus memasang spanduk sudah berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah. Dalam pasal 6, apabila setelah diberikan surat teguran, wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya, dapat memerintahkan kepada juru sita untuk memasang spanduk di tempat/ lokasi usahanya.

Menurut Sutama, pihaknya sebelum melakukan upaya pemasangan spanduk telah berupaya melakukan sejumlah tahapan agar pemilik usaha ini membayar pajak. Namun karena tidak ada tindak lanjut dari pemilik usaha, maka dilakukanlah pemasangan spanduk. "Sekarang kami lakukan tahapan pemasangan spanduk yang berbunyi, 'objek pajak ini menunggak pajak daerah dan jika dalam jangka waktu 14 hari kerja tidak melunasi tunggakan pajaknya, kami akan melakukan penagihan dengan upaya paksa,'" tegas mantan Kepala BPPT Badung ini.

Sutama mengimbau kepada wajib pajak agar taat membayar pajak dan membayar pajak tepat waktu. "Tolong lah bayar pajak tepat waktu, agar kita tidak melakukan aksi yang lebih tegas lagi," tandasnya. asa



## Peningkatan Jalan di Nusa Penida Telan Rp 35 M

SEMARAPURA, NusaBali

Perkembangan pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, yang makin pesat selama ini masih terkendala infrastruktur jalan. Karena sejumlah ruas jalan masih rusak. Untuk peningkatan kualitas jalan setempat tahun 2019, dianggarkan Rp 35 miliar.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Klungkung Wayan Wasta mengatakan proyek peningkatan jalan di Nusa Penida dianggarkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 15,475 miliar, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp 16,329 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 22,500 miliar. "Untuk total anggaran tersebut sebesar Rp 35,304 miliar," Wasta, saat ditemui, Kamis (7/2).

Peningkatan jalan tersebut yakni jalan Pikat-Sompang, pertigaan Soyor-Sekartaji Desa Tanglad (Bukit Teletubis), jalan Batumadeg-Sebuluh, jalan Ambengan-Pelilit, dan lainnya. "Peningkatan infrastruktur ini untuk mengejar ketimpangan di Nusa Penida," ujarnya. Di samping itu peningkatan jalan Pondokhe-Senangka, sebelumnya sudah dianggarkan Rp 1,5 miliar, namun pelaksanaannya tidak selesai.

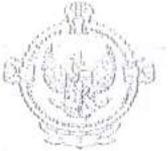
Tahun ini pengerjaannya kembali dilanjutkan. Proyek ini juga sempat mendapat sorotan dari anggota DPRD Klungkung ketika menggelar sidak ke lokasi. Lebih lanjut dijelaskan, untuk di Klungkung Daratan, peningkatan jalan dianggarkan dari dana BKK Rp 3,8 miliar dan DAU Rp 19



• IST  
Kepala Bappelitbang Klungkung I Wayan Wasta

miliar. "Untuk proyek infrastruktur yang dianggarkan di atas Rp 1 miliar sebanyak 42 paket," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Klungkung sudah turun menggelar sidak proyek jalan di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung, beberapa waktu lalu. Anggota Komisi II DPRD Klungkung Gde Artison Andarawata mengatakan, pihaknya sangat kecewa, di tengah-tengah usaha meningkatkan infrastruktur, pendukung pariwisata terjadi hal seperti ini. "Kamki akan rapat kerjakan untuk ditindaklanjuti dan pertanyakan apakah Klungkung sehat dalam (Unit Layanan Pengadaan) ULP atau pelelangan proyek infrastrukturnya," ujarnya. wan



# Total Dana Desa di Badung 2019 Rp 675 M

Desa Pelaga, Kecamatan Petang mendapat dana desa terbesar yakni Rp 21.758.529.825, sedangkan yang terkecil diperoleh Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi senilai Rp 11.713.246.302.

MANGUPURA, NusaBali  
Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor

115/0419/HK/2018 tentang penetapan bagi hasil dana pajak daerah dan redistribusi daerah, bagi hasil dana perimbangan dan dana desa kepada

pemerintah desa. Adapun total dana desa tahun 2019 yang dialokasikan untuk 46 desa se-Kabupaten Badung senilai Rp 675 miliar atau persisnya Rp 675.214.739.785.

Dana desa tersebut meliputi penyisihan 10 persen pajak daerah senilai Rp 561.188.431.928, penyisihan 10 persen redistribusi daerah senilai Rp 16.781.015.257, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan senilai Rp 44.660.525.600, dan dana desa yang bersumber dari APBN

senilai Rp 52.584.767.000.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana, menjelaskan setelah keluarnya SK Nomor 115/0419/HK/2018, maka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk proses penyerahan dana tersebut ke masing-masing desa. Namun, mengenai waktu penyerahan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati. "SK ini menjadi dasar penetapan alokasi dana desa tahun 2019. Rencana dalam waktu dekat

akan diserahkan langsung oleh bupati," ujarnya, Kamis (7/2).

"Dari 46 desa yang ada di Kabupaten Badung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang mendapat dana terbesar yakni Rp 21.758.529.825, sedangkan yang terkecil diperoleh Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi senilai Rp 11.713.246.302," beber Sridana.

Lantaran dana desa yang cukup besar, seluruh perbekel diharapkan untuk menaati segala ketentuan dalam hal penggunaan dana tersebut. Sridana

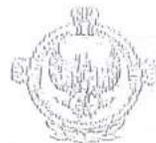
mengatakan, penggunaan dana desa sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan TA 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi.

Sridana berharap para perbekel dalam mengarahkan dana desa benar-benar mengikuti aturan yang berlaku. Sebab, di beberapa wilayah di Indonesia ada beberapa kasus perbekel atau kepala desa berurusan dengan penegak hukum lantaran melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

"Pesan yang sering disampaikan Bapak Bupati, kalau tidak mau berurusan dengan hukum, caranya gampang jangan melanggar hukum," tandas Sridana. **asa**

Edisi : Jumat, 8-2-2019

Hal : 2



## Rp 675 Miliar untuk Desa

### ● Dana Desa Pelaga Terbesar, Kuwum Terkecil

**MANGUPURA, TRIBUN BALI** - Pemerintah Kabupaten Badung kembali akan mengucurkan dana desa senilai Rp 675.214.739.785 untuk 42 desa yang ada di Gumi Keris.

Dana desa ini dibagikan sesuai dengan surat Keputusan Bupati Badung No 115/0419/HK/2018 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Badung Tahun 2019.

"SK Bupati inilah yang menjadi dasar penetapan alokasi dana desa, yang dalam waktu dekat diserahkan langsung oleh Bapak Bupati kepada para perbekel," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Putu Gede Sridana, Kamis (7/2).

Menurutnya, dari 42 desa yang ada di Kabupaten Badung, Desa Pelaga Kecamatan Petang mendapat dana terbesar yakni Rp 21.758.529.825. Sedangkan yang terkecil diperoleh Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi sebesar Rp 11.713.246.302.

Dari Surat Keputusan Bupati Badung, dijelaskannya, dana ratusan miliar itu meliputi penyisihan 10 persen pajak daerah Rp 561.188.431.928, penyisihan 10 persen redistribusi daerah Rp 16.781.015.257, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan Rp 44.660.525.600 dan dana desa yang bersumber dari APBN Rp 52.584.767.000.

"Ini kan dilihat dari luas wilayah dan juga jumlah penduduk desa. Jadi semua desa akan kecipratan," ujarnya.

Ditanya soal pengarahannya dana tersebut, Sridana menjelaskan, regulasi untuk pengarahannya dana tersebut oleh perbekel sudah sangat jelas. Diantaranya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 20 tahun 2018, tentang Sistem Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan No 145/PMK.07/2018.

Dengan adanya bantuan ini, pihaknya berharap para perbekel dalam mengarahkan dana desa harus benar-

benar mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat ada beberapa kasus perbekel atau kepala desa berurusan dengan hukum karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana desa.

"Kan ada perbekel yang sudah terjerat hukum karena penyimpangan anggaran. Maka dari itu seperti pesan yang sering disampaikan Bapak Bupati, kalau tidak mau berurusan dengan hukum, caranya gampang, jangan melanggar hukum," tuturnya.

Dia menjelaskan terkait dengan dasar hukum pengarahannya dana desa sudah jelas, sehingga perbekel yang



TRIBUN BALI/I KOMANG AGUS ARYANTA

#### PUTU GEDE SRIDANA

ada di Kabupaten Badung hanya mengikuti aturan saja. "Ikuti ja aturannya dan jangan menyimpang, kalau tidak ingin berurusan hukum," katanya. (gus)

#### DANA DESA

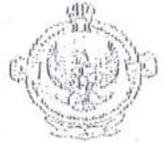
- Desa Pelaga Kecamatan Petang Rp 21.758.529.825.
- Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara Rp 21,5 miliar lebih
- Desa Kuwum Kecamatan Mengwi Rp 11.713.246.302.

#### SUMBER DANA

- Penyisihan 10 persen pajak daerah Rp 561.188.431.928,
- Penyisihan 10 persen redistribusi daerah Rp 16.781.015.257
- Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan Rp 44.660.525.600
- Dana desa yang bersumber dari APBN Rp 52.584.767.000.

Edisi : Jumat, 8, Feb, 2019

Hal : 6



## Pemerintah Desa Pelaga Kelola Dana Rp 21,7 Miliar

### Mangupura (Bali Post) -

Desa Pelaga Kecamatan Petang mendapatkan dana terbesar dari yang ditetapkan Pemkab Badung tahun ini. Pembagian dana ke desa ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung No. 115/0419/HK/2018 tentang Penetapan Bagi Hasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Badung tahun 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Badung Putu Gede Sridana, Kamis (7/2) kemarin, mengungkapkan Pemerintah Desa Pelaga menerima dana sangat besar yakni Rp 21.758.529.825. "Dari 46 desa

yang ada di Kabupaten Badung, Desa Pelaga mendapat dana terbesar. Sedangkan yang terkecil diperoleh Desa Kuwum Kecamatan Mengwi sebesar Rp 11.713.246.302," ungkapnya.

Menurutnya, total dana ke desa tahun 2019 yang dialokasikan di Kabupaten Badung sebesar Rp 675.214.739.785. Rinciannya, penyesuaian 10 persen pajak daerah sebesar Rp 561.188.431.928, penyesuaian 10 persen retribusi daerah sebesar Rp 16.781.015.257, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan sebesar Rp 44.660.525.600 dan dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 52.584.767.000.

"SK sudah ditandatangani

bapak bupati. Ini yang menjadi dasar penetapan alokasi dana desa yang dalam waktu dekat diserahkan langsung oleh Bapak Bupati kepada para perbekel," jelasnya.

Selain Desa Pelaga, kata Sridana, Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara juga mendapatkan dana yang besar yaitu Rp 21,5 miliar lebih. Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Sistem Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.07/2018. "Regulasi untuk pengarahannya sangat jelas," tegasnya.

Dengan besarnya dana yang dikelola pemerintah desa, para perbekel diharapkan benar-benar mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat ada beberapa kasus perbekel atau kepala desa berurusan dengan penegak hukum karena melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana.

"Dasar hukum pengarahannya sudah jelas, perbekel tinggal mengikuti itu. Jangan menyimpang, kalau tidak ingin berurusan dengan aparat penegak hukum. Seperti pesan yang sering disampaikan Bapak Bupati, kalau tidak mau berurusan dengan hukum caranya gampang, jangan melanggar hukum," pungkasnya. (kmb27)

Edisi : Jumat, 8 Februari 2019

Hal : 3



## APBDes Molor, Gaji Perangkat Desa Tak Cair

**Tabanan (Bali Post) -**

Para perangkat desa se-Kabupaten Tabanan hingga saat ini belum mendapatkan gaji bulan Januari.

Pasalnya, banyak desa yang belum melakukan pengamprahan gaji dan menyetorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Terkait hal itu, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan mengeluarkan surat edaran agar

desa segera melakukan pengamprahan. "Kami sudah buat surat edaran agar desa mengamprah ADD ke Bakeuda. Di antaranya ada gaji aparat desa di sana," terang Kepala Bakeuda Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti, Kamis (7/2) kemarin.

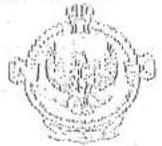
Menurutnya, pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) saat ini tidak lagi dilakukan secara bersamaan. Jika ada sejumlah desa yang sudah tuntas, akan dilakukan evaluasi dan verifikasi. Kalau dinyatakan lengkap, barulah bisa langsung dicairkan oleh Bagian Keuangan Setda Tabanan. Apalagi diakuinya, dana yang belum dicairkan

tersebut juga berdampak pada roda pemerintahan tingkat desa seperti, pembangunan di tingkat desa belum bisa dilaksanakan, termasuk gaji perangkat desa untuk Januari belum bisa dibayar.

Tidak hanya ADD yang tersendat, dana desa yang berasal dari pemerintah pusat juga belum turun. Ini dikarenakan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penetapan besaran ke desa-desa sedang dalam proses fasilitasi ke provinsi. "Perda dan Perbup APBD tahun anggaran 2019 sudah kami kirim baik melalui sistem maupun secara *hard copy* ke Kemendagri dan DJPK," ucapnya. (kmb28)

Edisi : Jumat, 8, Feb, 2019

Hal : 2



**Kasus Korupsi Santunan Kematian**

# Berkas Dua Oknum Kadus Dilimpahkan ke Tipikor

Negara (Bali Post)-

Berkas dua oknum kepala dusun (kadus) tersangka kasus korupsi Santunan Kematian telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar. Kasi Pidsus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra, Jumat (8/2) kemarin, mengatakan setelah pelimpahan tahap II, dua tersangka yakni Gede As dari Banjar Munduk Ranti dan IDKA dari Dusun Sarikuning Tulungagung, Desa Tukadaya, Melaya sudah dinyatakan lengkap, sehingga pada Rabu (6/2) lalu dilakukan pelimpahan. "Sudah kita limpahkan Rabu lalu, delapan jaksa ditunjuk untuk kasus ini," terang Ivan.

Saat ini dua tersangka oknum kadus tersebut masih berstatus tahanan titipan Kejari Jembrana di Rutan Kelas IIB Negara. Pihaknya akan memperpanjang masa tahanan sebelum nantinya disidangkan. Keduanya melanggar primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Negara Nyoman Tulus Sedeng dikonfirmasi terpisah membenarkan dua kadus tersebut masih ditahan berbaur bersama tahanan lain di rutan. Mereka berstatus tahanan Kejari Negara hingga tanggal 13 Februari 2019. Keduanya sudah dititip di rutan sejak 24 Januari

lalu. "Karena statusnya masih tahanan titipan, berbaur dengan tahanan yang lain," tukas Tulus.

Sebelumnya pada pekan lalu Tim Tipikor Polres Jembrana melimpahkan dua tersangka oknum kadus terkait kasus korupsi Dana Santunan Kematian.

Kasus korupsi yang menjerat dua oknum kadus ini berkaitan dengan tersangka sebelumnya, Indah Suryaningsih, oknum PNS di Dinas Sosial. Indah sudah lebih dulu divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Indah yang memiliki kewenangan bersekongkol dengan dua oknum kadus ini.

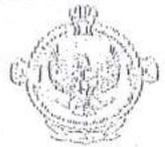
Modusnya dengan membuat pengajuan seolah-olah ada warga yang meninggal dunia. Setelah nanti dana santunan tersebut cair, maka hasilnya akan dibagi sesuai peran masing-masing. Untuk pembagiannya, apabila Indah yang membuat dokumen fiktif, maka mendapatkan bagian

Rp 1 juta dan kadus menerima masing-masing Rp 500 ribu. Namun bila dua kadus tersebut yang membuat dokumen fiktif, maka pembagiannya Indah Rp 800 ribu dan kadus Rp 700 ribu.

Program santunan kematian yang merupakan program Pemkab Jembrana menganggarkan Rp 1,5 juta untuk setiap warga meninggal. Dengan adanya kerja sama ini, maka dana santunan ini bisa lolos hingga ratusan berkas. Selama kurun waktu setahun mulai Januari sampai Desember 2015, kerugian negara IDKA mencapai Rp 210 juta. Dengan 140 berkas fiktif pengajuan santunan kematian. Sementara I Gede As kerugian negara mencapai Rp 88 juta lebih. Berkas fiktif yang diajukan beragam. Di antaranya ada berkas lama warga yang meninggal diajukan kembali, ada juga warga yang masih hidup dibuatkan berkas meninggal. (kmb26)

Edisi : Sabtu, 9, Feb, 2019

Hal : 10



# Kasus Tirta Empul Gamang

Kapolres Tunda Hasil Audit

Gianyar (Bali Post) -

Jajaran Polres Gianyar masih mendalami kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) petugas karcis Pura Tirta Empul. Namun, perkembangan penanganan kasus ini hingga saat ini terkesan masih gamang. Padahal Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo sebelumnya sempat menyebut Bendesa Manukaya Let Made Mawi sebagai calon tersangka.

Dikonfirmasi Jumat (8/2) kemarin, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menegaskan, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. "Tersangka memang belum ada. Proses hukum enggak boleh menganda-andai," ujarnya.

Priyanto Priyo Hutomo mengatakan, jajarannya dalam Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) tidak selalu memproses melalui alur hukum. Namun bisa melewati ke pembinaan.

"Yang penting dia membayar kerugian ke Pemkab Gianyar. Kasusnya kami kasih ke Inspektorat," jelasnya.

Menurut Priyanto Priyo Hutomo, Tim Saber Pungli memiliki peranan yang bukan semata-mata ke ranah hukum. Namun ada beberapa langkah, meliputi edukasi hingga penegakan. "Kalau mereka bisa tertib, karena dulunya kan diserobot. Yang jaga diambil sendiri," jelasnya.

Ia menyebutkan, dulu saat desa pakraman memungut

karcis di sore hari, pendapatan mereka mencapai Rp 30 juta sehari. "Sekarang bisa Rp 100 juta. Dulu Rp 30 juta sehari dikalikan 30 hari hanya Rp 900 juta. Sekarang menjadi Rp 100 juta dikalikan 30 hari," paparnya.

Ditanya soal ending kasus tersebut, Priyanto Priyo Hutomo mengaku masih menunggu penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gianyar. "Pokoknya kalau dari Bapak Bupati sudah

mengirim auditnya, kemudian ada kesanggupan dari desa adat mengembalikan, saya serahkan ke Inspektorat. Sudah begitu saja," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil penyelidikan kasus OTT di Objek Wisata Pura Tirta Empul, Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menyebut Bendesa Pakraman Manukaya Let I Made Mawi Arnata sebagai calon tersangka. "Beliau baru calon (tersangka -red), untuk penetapan tersangka, kami masih menunggu saksi ahli hukum pidana. Kalau sudah, langsung kami tetapkan dan kami gelar, langsung naik ke tersangka," katanya dalam jumpa pers di

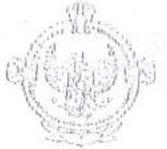
Mapolres Gianyar, beberapa waktu lalu.

Namun, kala itu Kapolres Gianyar belum mau mejabarkan alasan Bendesa Pakraman Manukaya Let yang juga pangempon Pura Tirta Empul ini sebagai calon tersangka. "Calon tersangka, nanti fakta keterangan akan disimpulkan penyidik. Nanti tinggal perannya masing-masing. Misalnya, bendesa, bendahara apa, wakilnya apa, hingga siapa yang memerintahkan uang ditaruh di LPD," katanya.

Namun, ditegaskan, sampai saat ini Bendesa Pakraman Manukaya Let masih berstatus sebagai saksi. Begitu pula dengan sebelas saksi lainnya yang sudah diperiksa polisi. (kmb35)

Edisi : Sabtu, 9, Feb, 2019

Hal : 9



## Terkait Pembangunan Pasar Umum Gianyar Rp 250 M Pekab Bangun Pasar Darurat Rp 3 M Lebih



• NUSABALI/WILASA

Wajah sisi utara Pasar Umum Gianyar. Pasar ini akan direhab dengan anggaran Rp 250 miliar. Kondisi pasar makin tak tertata. Terbukti, Bendera Merah Putih di pintu pasar ini terbiarkan robek pesranting (bergelanyut remuk) hingga membuat kesan kumuh.

GIANYAR, NusaBali

Pekab Gianyar akan membangun pasar darurat/sementara dengan biaya sekitar Rp 3 miliar lebih di Kelurahan Samplangan, atau selatan Bukitjati, sekitar 600 meter arah timur Pasar Umum Gianyar. Anggaran tersebut akan dipakai biaya sewa lahan sekitar 2 hektare Rp 1,5 miliar dan biaya fisik pasar dan fasilitas lainnya Rp 1,5 miliar lebih.

Data yang diperoleh NusaBali di Gianyar, Jumat (8/2), pembangunan pasar darurat itu untuk relokasi 1.102 pedagang dari Pasar Umum Gianyar. Karena Pekab Gianyar menargetkan pembangunan fisik Pasar Umum Gianyar

senilai Rp 250 miliar dimulai Desember 2019. Oleh karena itu, 1.102 pedagang di pasar tersebut harus dipindahkan ke pasar darurat di Samplangan, September 2019.

Kepada NusaBali, Jumat kemarin, Ketua I Panitia Pembangunan Pasar Umum Gianyar I Gde Widarma Suharta mengatakan, Panitia Pembangunan Pasar Umum Gianyar kini terus mematangkan persiapan pembangunan pasar tersebut, dengan prioritas pembangunan pasar darurat. Seiring itu, kini panitia sedang mengintensifkan koordinasi dengan para pemilik tanah yang tanahnya akan

disewa untuk pasar sementara. "Dari skedul kami, Desember 2019, seluruh bangunan Pasar Umum Gianyar dibongkar. Karena proyek pembangunan pasar saat itu akan dimulai," jelasnya.

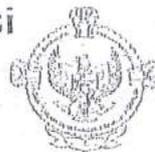
Widarma yang Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Gianyar ini, menambahkan, pihaknya kini sedang mempersiapkan tender pembangunan pasar sementara. Sedangkan tender untuk kegiatan perencanaan dan fisik Pasar Umum Gianyar akan berlangsung tahun 2019/2020 dengan anggaran Rp 200 miliar. Pembangunan pasar ini akan dilanjutkan dengan anggaran perubahan tahun 2020, Rp 50 miliar.

Sekretaris Panitia Pembangunan Pasar Umum Gianyar I Wayan Suamba menambahkan, panitia akan menggelar rapat terkait pematangan rencana sewa lahan pasar sementara di Samplangan. "Baik untuk pembangunan pasar sementara maupun Pasar Umum Gianyar, tentu banyak hal yang masih harus kami persiapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, Pekab Gianyar akan membangun/rehab total Pasar Umum Gianyar dengan biaya Rp 250 miliar. Pasar ini dibangun bertahap enam, di antaranya dua lain untuk base man. **Isa**

Edisi : Sabtu, 9, Feb, 2019

Hal : 6



# Pengusutan Jalan di Tempat

## Terkait OTT Tirta Empul

**GIANYAR** - Penyelidikan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pura Tirta Empul pada November 2018 lalu jalan di tempat. Polres Gianyar sebelumnya sempat menjadikan Bendesa Manukaya Let, Made Mawi sebagai calon tersangka. Namun, hingga kemarin kasusnya tidak jelas.

Kapolres Gianyar, AKBP Priyanto Priyo Hutomo menegaskan belum ada calon tersangka. "Kan belum ada. Proses hukum nggak boleh berandai-andai," kata Priyanto di Mapolres Gianyar, Jumat (8/2).

Kapolres mengatakan, tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) tidak selalu memproses melalui jalur hukum. "Tapi pembinaan. Yang penting dia membayar kerugian ke Pemda Gianyar. Berapa (nilainya, Red). Kasusnya kami kasih ke Inspektorat," ucapnya.

Menurut Priyanto Saber Pungli memiliki peranan yang bukan semata-mata ke ranah hukum. "Pertama edukasi, penegakan. Kalau mereka bisa tertib, karena dulunya kan diserobot. Yang jaga diambil sendiri," jelasnya.

Dengan pengelolaan yang baru, maka pendapatan bagi desa Pakraman dan pemerintah meningkat. "Siapa yang

diuntungkan? Kan masyarakat juga. Ada efek positif," imbuhnya.

Lanjut Priyanto, jika sebelumnya desa Pakraman memungut karcis di sore hari, pendapatan mereka mencapai Rp 30 juta sehari. "Sekarang bisa 100 juta. Dulu Rp 30 juta sehari dikalikan 30 hari hanya Rp 900 juta. Sekarang Rp 100 juta dikalikan 30 hari," paparnya.

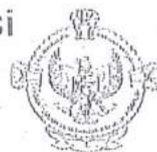
Ditanya kelanjutan kasus tersebut, Priyanto mengaku masih menunggu penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gianyar. "Pokoknya kalau dari pak bupati sudah mengirim auditnya, kemudian ada kesanggupan dari desa adat mengem-

balikan, saya serahkan ke Inspektorat. Sudah begitu saja," tukasnya.

Sebelumnya, dua petugas karcis, Wayan Gerindra, 48, dan Dewa Putu Degdeg, 78, terjaring OTT pada Kamis 7 November 2018 pukul 17.00. Keduanya saat press rilis di hadapan para awak media pada 13 November 2018 lalu, Kapolres bersama Kasat Reskrim AKP Deni Septiawan menyebut Bendesa Manukaya Let sebagai calon tersangka. Nama Bendesa mencuat selaku penanggungjawab atas pungutan karcis yang berlaku mulai pukul 15.00 hingga pukul 18.00. Namun, uang pungutan karcis tidak disetor ke kas daerah. (dra/dot)

Edisi : Sabtu, 09-02-2019

Hal. : 4



# Dishub dan DLHK Saling Lempar

## Ditanya Ongkos Bus Sekolah Pakai Sampah

DENPASAR - Wacana sampah menjadi alat pembayaran siswa penumpang bus sekolah masih tidak jelas. Pasalnya, wacana yang katanya sudah dilakukan sosialisasi kepada siswa itu sampai saat ini mengambang. Saat koran ini mengkonfirmasi, dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), malah saling lempar.



**Itu bukan program DLHK. Coba hubungi Dishub, ya."**

**IB PUTRA WIRABAWA**  
Sekretaris DLHK Denpasar

Sekretaris DLHK IB Putra Wirabawa dikonfirmasi kemarin menyatakan, program tersebut milik Dinas Perhubungan (Dishub). "Itu bukan program DLHK. Coba hubungi Dishub, ya," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPT Pelayanan Transportasi Darat Dishub



**DLHK sebagai koordinatornya. Soalnya bukan di Dishub leader-nya."**

**I DEWA KETUT ADI PRADNYANA**  
Kepala UPT PTD Dishub Denpasar

Kota Denpasar I Dewa Ketut Adi Pradnyana menyatakan bahwa program itu masih diintegrasikan dengan program pelajar peduli lingkungan. Namun, ia menuding DLHK sebagai coordinator program ini. "DLHK sebagai koordinatornya. Soalnya

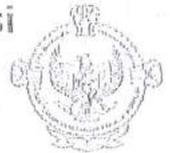
bukan di Dishub leader-nya," aku dia

Ketika dijelaskan bahwa Koran sudah menanyakan ke DLHK dan disebut Dishub yang punya program, Dewa Adi mengatakan, gambaran programnya memang semua siswa di Denpasar wajib memiliki tabungan bank sampah. Namun, dia tetap ngotot DLHK sebagai koordinatornya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, program dan aplikasi tersebut dibuat dari DLHK. Saat ini sedang disosialisasikan dan akan rampung pertengahan bulan ini. "Bus sekolah bagian dari sistem tersebut," ungkapnya. (feb/yor)

Edisi : Sabtu, 9 Feb -19

Hal. : 8



# Duo Klian Kematian Fiktif Segera Disidang

## Tinggal Tunggu Jadwal di Pengadilan Tipikor Denpasar

NEGARA - Dua tersangka kasus korupsi santunan kematian, yakni kepala kewilayahan Banjar Sarikuning Tulungagung I Dewa Ketut Artawan dan Banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa, sudah dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana

korupsi, Denpasar. Sehingga, dalam waktu dekat kedua tersangka tersebut segera disidangkan.

Kasipidus Kejari Jembrana Ivan Praditya Putra mengatakan, pelimpahan ke pengadilan Tipikor Denpasar sudah dilakukan pada hari Rabu (6/2) lalu. "Sekarang tinggal menunggu jadwal sidangnya," terangnya, Jumat kemarin (8/2).

Dua kepala kewilayahan dari Desa Tukadaya, Kecamatan

### Akal-Akalan Manipulasi Data Kematian

#### Tersangka:

1. Klian banjar Sarikuning Tulungagung I Dewa Ketut Artawan, diduga menerima Rp 75.800.000
2. Klian banjar Munduk Ranti Tukadaya I Gede Astawa, diduga menerima Rp 32.000.000
3. Indah Suryaningsih (oknum PNS Dinas Sosial Jembrana) (sudah divonis 4 tahun)

#### Jeratan:

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara.

Melaya tersebut, akan di kawal tim jaksa penuntut umum (JPU) yang akan menjadi penuntut dua tersangka, sebanyak

delapan orang jaksa. Beberapa di antaranya, jaksa yang menjabat kepala seksi di Kejari Jembrana.

Kedua tersangka dijera Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi dan pasal 3 UU pidana

korupsi junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun penjara.

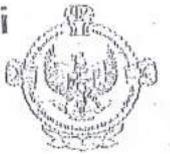
Kasus korupsi santunan kematian tersebut, selain menyeret kepala kewilayahan atau klian banjar juga seorang PNS, yakni Indah Suryaningsih. Indah sudah divonis bersalah dan diganjar dengan 4 tahun pidana penjara. Hakim juga membebankan terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 171 juta, namun jaksa

masih banding karena denda tidak sesuai dengan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 239 juta.

Kepala Kewilayahan Banjar Sarikuning Tulungagung I Dewa Ketut Artawan menerima Rp 75.800.000; Kepala Kewilayahan Banjar Munduk Rani Tukadaya I Gede Astawa, disangka menerima uang Rp 32.000.000 dari hasil korupsi santunan kematian. (bas/han)

Edisi : Sabtu, 9-02-2014

Hal. : 9



## LEMBAGA KEUANGAN

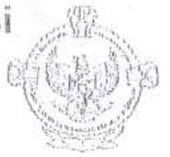
### LPD Bangkrut Lantaran Korupsi Internal

AMLAPURA - LPD Sibetan, Bebandem, Karangasem menjadi salah satu LPD terbaik di Bali. Telah menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan dana nasabah. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan juga semakin bagus. Ini membuat nasabah semakin nyaman dan terus mempercayakan jasa keuangannya kepada LPD tersebut. LPD Sibetan masuk dalam 80 LPD se Bali yang katagori sehat. Kepala LPD Sibetan, IMade Mastiawan disela sela perayaan HUT LPD Sibetan di Gedung Serba Guna Desa Adat Sibetan, Bebandem. Dibangun tahun 1990 dengan modal 2 juta. Modal ini merupakan bantuan Provinsi Bali. Dana itulah yang hingga kini di putar dan di kelola sehingga menjadi besar seperti saat ini dengan usianya yang sudah 28 tahun. Sejalan dengan misi sosial yang diembannya untuk meningkatkan prekonomian Desa adat. Kini LPD ini sudah punya modal sebesar Rp 24.323.119.000 (Rp 24 miliar lebih). Menurut Mastiawan, tahun ini keuntungan LPD Sibetan naik 9 persen dari tahun 2017. Dimana tahun 2017 dengan keuntungan Rp 3.206.679.000. Di tahun 2018 menjadi Rp 3.555.686.000.

Sejak tahun 1990 LPD ini didukung 11 karyawan dan kini sudah berhasil menghimpun dana masyarakat berupa Tabungan dan deposito. "Karena LPD sendiri milik Desa Pakraman menjadi tumpuan ekonomi dan pelestarian adat," kata Bendesa adat Sibetan I Wayan Subadra. (tra/rid)

Edisi : Senin, 11 Februari 2019

Hal. : 2



## Warga Tanya Keseriusan Kejati

### Dalam Pengusutan Dugaan Korupsi DD Dauh Puri Kelod

**DENPASAR** - Warga yang melaporkan dugaan korupsi dana desa (DD) hampir Rp 1 miliar di Desa Dauh Puri Kelod, Denpasar Barat, mulai mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Pasalnya, sebulan sejak laporan 7 Januari lalu belum ada perkembangan berarti.

I Nyoman Mardika, warga yang melaporkan kasus ini mengaku sudah menanyakan perkembangan ke Kejati Bali pada Senin (4/2) lalu melalui sambungan telepon. Informasi yang dia dapat, Kejati Bali sudah bersurat ke Inspektorat Kota Denpasar. "Kalau sebatas bersurat ke Inspektorat *kok* butuh waktu hampir sebulan. *Kok* baru sebatas bersurat. Menurut saya, cukup lama prosesnya," ujar Mardika kepada koran ini kemarin (10/2).

Mardika berharap Kejati Bali bisa bekerja lebih cepat. Sebab, sejak melaporkan kasus ini pada 7 Januari silam, dia mendapat informasi bahwa sepekan setelah pelaporan kasus akan diteliti. Setelah itu Kejati akan mengambil tindakan selanjutnya.

"Harapan saya proses penelitian itu tidak lama sampai sebulan. Kalau sampai sebulan kelamaan. Saya berharap hasil penelitian bisa dinaikkan menjadi penyelidikan," imbuh pria yang juga kepala dusun itu.

Mardika sendiri mengaku sudah mendapat informasi jika Inspektorat memerintahkan sejumlah pihak yang terlibat segera mengembalikan uang yang hilang. Namun, Mardika melihat dirinya tidak memiliki kapasitas sebagaimana yang dimaksud Inspektorat. Sebagai warga yang mengetahui kasus ini sejak awal, mardika berharap ada penegakan hukum dari Kejati Bali. "Menurut saya yang terpenting penegakan hukum," tandas pria 47 tahun itu.

Mardika akan kembali menanyakan kasus ini ke Kejati Bali. Rencananya dia akan datang langsung ke Kejati Bali pada Selasa atau Rabu mendatang.

Dikonfirmasi terpisah, Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Edwin Beslar mengatakan belum mengecek kelanjutan kasus ini. "Besok (hari ini) akan saya cek ke bagian pidana khusus (pidsus)," kata Edwin.

Edwin menegaskan, jika cukup bukti ditemukan unsur tindak pidana korupsi, maka status penelitian akan ditingkatkan menjadi penyelidikan. Edwin juga mempersilakan pelapor yakni I Nyoman Mardika untuk mengecek perkembangan kasus ini karena sudah mendapat surat tanda terima laporan diterima. "Perkembangan kasus ini seperti apa, pelapor punya hak mengecek perkembangannya," tukas Edwin.

Sekadar meningkatkan, dugaan kasus

korupsi dana desa di Desa Dauh Puri Kelod, ini bermula dari evaluasi internal dana APBDes 2017. Dari hasil audit itu ditemukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 1,95 miliar. Namun, setelah dimintai pertanggungjawaban, perangkat desa yakni perbekel, bendahara, dan kaur keuangan tidak bisa menunjukkan jumlah uang Rp 1,95 miliar. Dana yang tersedia hanya Rp 900 juta.

"Anehnya separo lebih dana yang tidak ada itu tidak diketahui siapa yang mengambil. Mereka tidak ada yang mau mengakui. Akhirnya, dibentuklah tim penelusuran kasus. Salah satu anggotanya adalah saya," beber Mardika.

Meski demikian proses audit internal berlanjut dengan melibatkan auditor independen. Hasilnya menemukan selisih yang tidak beda jauh dengan evaluasi sebelumnya. Menindaklanjuti kejanggalaan yang ada, akhirnya disepakati melapor kepada Pemkot Denpasar.

Mardika bertemu langsung dengan Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara di rumah wakil wali kota. Setelah itu Pemkot Denpasar mengutus Inspektorat melakukan audit di Desa Dauh Puri Kelod pada Agustus 2017.

Dari hasil audit tersebut, bendahara desa atas nama Ni Luh Putu Aryaningsih harus mengembalikan uang Rp 877 juta. "Tapi, bendahara ini mengaku tidak sanggup jika

harus mengembalikan uang sejumlah Rp 877 juta tersebut. Bendahara mengaku ikut memakai uang, tapi katanya tidak sebesar itu (Rp 877 juta)," urainya.

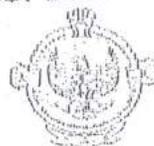
Kemudian perbekel saat itu I Gusti Made Wira Namiarta sudah mengembalikan Rp 8,5 juta, dan Kaur Keuangan I Putu Wirawan sebesar Rp 102,82 juta. Temuan tersebut tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Denpasar. I Gusti Made Wira Namiarta sendiri telah mengundurkan diri dari perbekel lalu maju sebagai calon anggota legislatif Kota Denpasar melalui PDIP dapil Denpasar Barat.

Ditegaskan Mardika, sesuai ketentuan perundang-undangan paling lama dua bulan atau 60 hari kerja inspektorat wajib melaporkan temuan tersebut kepada penegak hukum. "Namun, setelah lima bulan berlalu tidak ada tindak lanjut dari Inspektorat Pemkot Denpasar. Saya sebagai warga akhirnya berniatif melapor ke Kejati Bali karena tidak ada tindak lanjut dari temuan tersebut," tukasnya.

Mardika kembali menegaskan, dalam laporannya ke kejati Bali tidak melaporkan orang per orang perangkat desa. Tapi ia melaporkan kepada penegak hukum tentang adanya dugaan penyelewengan dana APBDes. Hal itu juga diperkuat dengan adanya LHP Inspektorat Pemkot Denpasar. **(san/dit)**

Edisi : Senin, 11 Februari 2019

Hal. : 4



## Dewan Soroti SP3 Kasus OTT

Gianyar (Bali Post) -

Turunnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) kasus OTT terhadap mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Gianyar Ketut Mudana, mendapat sorotan kalangan DPRD Gianyar dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Gianyar, Senin (11/2) kemarin. Sementara Bupati Gianyar I Made Mahayastra memastikan pasca-SP3 Ketut Mudana akan dikembalikan pada jabatan setingkat eselon II.

Fraksi Gerindra DPRD Gianyar melalui Sekretaris Fraksi Ida Bagus Nyoman Rai mempertanyakan apa yang dilakukan Bupati Gianyar terhadap Ketut Mudana yang kini sudah mendapat SP3. "Karena posisinya (Mudana - red) pernah dulu eselon II, nanti bagaimana, kita tunggu jawaban Bupati," ujarnya.

Anggota dewan yang akrab disapa Gus Rai ini mempertanyakan SP3 itu, mengingat kasusnya sudah menjadi perhatian publik. "Apa pun alasannya, ini bersangkutan dengan moral dan etika. Masyarakat sudah telanjur melihat itu," ujarnya.

Ditemui usai sidang, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui Ketut Mudana yang kasusnya ditangani Polda Bali sudah mendapat SP3. Menurut Mahayastra, pasca-SP3 posisi pejabat yang sempat terjerat kasus OTT itu harus dikembalikan ke posisi semula sebagai aparatur sipil negara (ASN). "Sudah diberhentikan penyidikannya, sehingga harus dikembalikan ke seperti semula. Wajib dia dikembalikan menjadi PNS dan menyandang jabatan," katanya.

Selama proses hukum berlangsung, pasca-OTT Mudana dirumahkan namun tetap memperoleh gaji sebesar 80 persen. Sementara pasca-SP3, Ketut Mudana belum diaktifkan sebagai ASN. "Sekarang posisinya dia belum saya aktifkan sebagai PNS. Kalau sekarang diaktifkan, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa yang pernah dia lalui dulu (saat di Panitia Seleksi eselon II - red)," jelasnya.

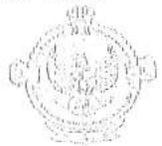
Lantas di mana Ketut Mudana akan ditempatkan? Bupati Mahayastra mengatakan, begitu pansel selesai bekerja, pria asal Kelurahan Sampangan itu akan dilantik bersamaan dengan pejabat yang lain, dengan posisi tetap pada jabatan setingkat eselon II. "Posisinya tetap di eselon II, yang jelas bukan di perizinan," tegasnya.

Disinggung terkait alasan Mudana tidak dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPSP) Kabupaten Gianyar, Bupati Mahayastra mengatakan *image* Ketut Mudana pada posisi itu sudah tidak layak. "Sudah jelek *image*-nya. Orang pernah bermasalah di sana kok dikembalikan ke sana (Perizinan - red), artinya di mata masyarakat awam kan itu masalah rasa, walau secara hukum sudah tidak terbukti tetap tidak bagus lagi di sana," terang pejabat asal Payangan ini.

Mahayastra mengatakan, pengisian jabatan itu akan terealisasi setelah pansel selesai melakukan penilaian. "Ya, nanti setelah pansel selesai bekerja. Secara aturan, bupati baru boleh melakukan mutasi setelah enam bulan," tegasnya. (kmb35)

Edisi : Selasa, 12 - 2 - 2019

Hal : 9



## OPD Diminta Intens Berkoordinasi dengan BPK

Tabanan (Bali Post) -

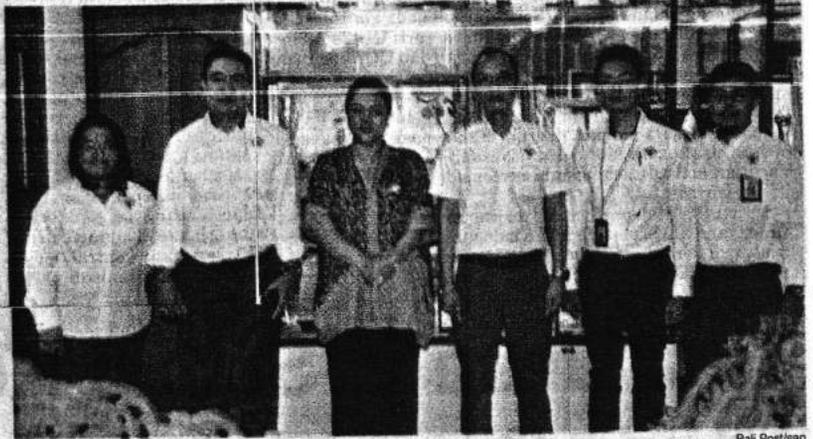
Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, Senin (11/2) kemarin mulai melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Pemkab Tabanan dan entitas terkait lainnya. Tim bertugas selama 30 hari, atau berakhir pada 12 Maret mendatang. Guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut, organisasi perangkat daerah (OPD) di Tabanan diminta intens berkoordinasi dengan tim BPK.

Tim BPK-RI Perwakilan Bali yang dipimpin Donny Ramli saat bertemu Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Sekda I Gede Susila mengungkapkan, pihaknya berharap dukungan dan kerja sama Pemkab Tabanan agar pemeriksaan tersebut dapat berjalan lancar. "Jika ada masalah, bisa disampaikan.

Ingat, jangan takut kepada BPK, karena kami juga memiliki fungsi melakukan pembinaan secara umum," imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Bupati Eka Wiryastuti mengajak seluruh OPD di Tabanan agar berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, serta mempersiapkan segala hal khususnya dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan. "Lakukan komunikasi dan koordinasi serta persiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan LKPD dapat berjalan dengan lancar. Saya minta agar para OPD terkait untuk mengawal *entry* ini agar dokumen yang diperlukan bisa tepat waktu dan lengkap," ungkapnya.

Dia menjelaskan, pemeriksaan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya ini agar selalu memiliki *progress* sehingga Kabupaten Tabanan bisa selalu



BPK - Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat menerima tim BPK-RI Perwakilan Bali.

mendapatkan WTP. "Jangan sampai kita terlena atas hasil yang di dapat. Jangan bangga jadi juara, tapi jadilah juara yang bisa konsisten. Tetap jadi baris terdepan dengan membina,

melatih *teamwork*. Kita pernah jatuh, dan jangan sampai jatuh lagi ke opini *disclaimer*," bebernya.

Ia juga mengimbau agar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan ti-

tidak takut bertanya kepada tim BPK. Tujuannya, meminimalisir kesalahan serta mampu membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi dan bisa dipertanggungjawabkan. (kmb24)

Edisi : Selasa, 12-2-19

Hal : 7



## Proyek RTH Bung Karno Tak Tuntas

# Badan Patung Dititipkan di Yogyakarta

Singaraja (Bali Post) -

Proyek tahap ketiga Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, ternyata gagal dituntaskan. Pelaksana proyek yang sudah mendapatkan perpanjangan pekerjaan selama 50 hari, tidak dapat menuntaskan pekerjaannya. Atas kondisi itu, Dinas Perumahan Permukiman dan Perencanaan (Perkimta) menitipkan bagian patung yang belum tuntas itu di tempat patung itu dikerjakan, di Yogyakarta.

Dalam proyek lanjutan itu, pelaksana proyek seharusnya menuntaskan pemasangan patung Bung Karno. Patung yang semestinya berdiri kokoh di areal inti RTH itu ternyata tidak selesai dikerjakan. Sampai kontrak berakhir, pelaksana hanya menyelesaikan bagian kaki dan kepala patung. Sedangkan, badan patung Bung Karno belum tuntas dikerjakan. Karena itu, bagian patung itu dititipkan pada lembaga perajin di Yogyakarta.

Saat ini, bagian badan atas dan tangan saja yang belum dikerjakan. Namun karena batas waktu kontrak sudah habis, maka seluruh peker-

jaan pembuatan patung itu terpaksa dihentikan.

Kepala Dinas Perkimta Ni Komang Surattini, Senin (11/2) kemarin, mengatakan pematung yang dikontrak oleh pelaksana proyek sudah membuat cetakan patung. Cetakan itu dibuat dengan bahan dasar fiber. Pematung tinggal melakukan cor logam termasuk pencetakan, sehingga bagian patung itu tuntas. Hanya, pengecoran dan pencetakan logam membutuhkan waktu sekitar tiga pekan. Akibatnya, cetakan patung itu dibiarkan di Yogyakarta. Namun, dititipkan secara resmi menggunakan berita acara. "Su-

dah dengan berita acaranya. Semua bagian yang sudah selesai, termasuk kepingan, semuanya kami simpan di RTH. Sedangkan yang belum selesai dikerjakan kami titipkan di Yogyakarta," katanya.

Menyusul tidak tuntasnya pelaksanaan proyek itu, Surattini berjanji melakukan kajian teknis. Kajian itu akan diajukan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pihaknya akan meminta fatwa, apakah proyek itu bisa dilanjutkan dengan prosedur penunjukan langsung (PL) atau harus dimulai dari nol lagi.

"Kami tidak ingin salah langkah. Pasalnya, tumben terjadi seperti ini. Pembuatan patung jadinya setengah saja. Kami akan melakukan kajian dulu. Kalau dilanjutkan seperti apa kebijakannya. Kalau mulai dari nol juga kami perlu petunjuk lanjutan," tegasnya.

Selain itu, pemerintah masih melakukan penghitungan total pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor pelaksana. Proyek itu diperkirakan

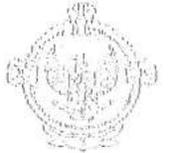


Bali Post/kmb

Ni Komang Surattini

baru selesai 49 persen dari total biaya pembangunan Rp 5,4 miliar. Se jauh ini, pemerintah baru membayar kepada pemborong Rp 2,64 miliar. "Pemer-

intah akan menagih dend keterlambatan proyek Rp 270 juta yang harus dibayar kontraktor itu, sebagai biay jaminan proyek itu. (kmb3f



# Jadwal Lelang Mobil Damkar Belum Pasti

## ★ 8 Unit Armada Diputihkan karena Sudah Tua

“Mobil itu memang sudah tua, tahun mobilnya juga 80-90an. Jadi memang sudah tidak layak pakai, ditambah lagi kerangka yang sudah tua dan kondisinya sudah parah. Jadi itu sudah dilakukan pemutihan pada 2017 lalu. Makanya kita akan lelang”

DENPASAR, NusaBali

Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) sudah dilakukan pemutihan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar sejak 2017 lalu. Mobil yang dalam kondisi rusak tersebut rencananya akan dilelang pada tahun 2018, namun hingga kini jadwal pelelangan belum dilakukan.



SEJUMLAH mobil pemadam kebakaran yang kondisinya sudah rusak menghuni Pos BPBD Juanda Renon.

Kepala BPBD Kota Denpasar, IB Joni Wirabawa saat dikonfirmasi, Senin (11/2) mengatakan, mobil damkar yang sudah berusia tua saat ini dalam proses menunggu jadwal lelang. Sebanyak 8 unit mobil damkar itu yakni 4 unit ukuran besar dan 4 unit lagi ukuran sedang jenis panther yang memang sudah tidak layak beroperasi. Bahkan kondisinya saat ini semakin parah karena tidak pernah dioperasikan sejak pemutihan dilakukan.

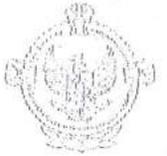
Untuk itu, pihaknya ingin melakukan lelang secepatnya. Sayangnya hingga kini jadwal belum ada untuk dilakukan pelelangan. “Mobil itu memang sudah tua, tahun mobilnya juga 80-90an. Jadi memang sudah tidak layak pakai, ditambah lagi kerangka yang sudah tua dan kondisinya sudah parah. Jadi itu sudah dilakukan pemutihan pada 2017 lalu. Makanya kita akan lelang,” ungkap IB Joni.

Kini mobil damkar yang sudah uzur tersebut masih berada di Pos

BPBD Juanda Renon. Mobil-mobil itu pun tidak dilakukan perawatan lagi karena memang tidak ada anggaran. Jika dipaksakan, maka anggaran yang dihabiskan hingga dua kali lipat dibandingkan mobil yang masih layak saat ini yakni Rp 10 juta hingga Rp 15 juta per tahunnya.

Diungkapkan IB Joni, tidak ada penambahan armada lagi di tahun ini, karena dengan jumlah kendaraan yang ada dirasakan sudah cukup untuk mengatasi bencana, terutama penanganan kebakaran di Kota Denpasar. “Sementara ini kami masih memiliki cukup armada dengan 8 Brandwee (mobil pemadam kebakaram), mobil tangki, dan 3 mobil bac up. Itu masih mampu untuk menyelesaikan masalah kebencanaan imbuhnya.

IB Joni akan menanyakan kembali waktu lelang yang dilakukan oleh BPKAD Kota Denpasar. Pihaknya pun menargetkan tahun ini mobil tersebut sudah dilelang. Sebab, jika dibiarkan terus, keadaannya mobil akan lebih parah. Apalagi tidak ada dana perawatan. “Ya kami harap tahun ini sudah selesai. Nanti saya akan tanyakan kapan sebenarnya jadwal lelang untuk mobil itu,” imbuhnya.



## Pasca Terima SP3 Kasus Operasi Tangkap Tangan Perijinan **Mantan Kadis PM-PPTSP Kembali ke Eselon 2**

GIANYAR, NusaBali

Mantan Kepala Dinas (kadis) Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Gianyar, Ketut Mudana, 50, akan kembali memegang jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama/eselon 2, setingkat kepala dinas atau badan. Pengembalian ini pasca terbitnya SP3 (surat pemberitahuan penghentian penyidikan) kasus OTT (operasi tangkap tangan) dari Polda Bali untuk Mudana, sekitar akhir 2018.

Hal itu ditegaskan Bupati Gianyar I Made Mahayastra

usai menghadiri sidang Penyampaian Pamandangan Umum Fraksi atas Enam Ranperda di DPRD Gianyar, Senin (11/2). "Saya harus kembalikan yang bersangkutan (Mudana, Red) ke jabatan eselon 2. Pengembaliannya masih menunggu mutasi pejabat nanti," jelasnya.

Bupati Mahayastra menambahkan, Mudana wajib kembali jadi PNS dan menyandang jenjang jabatan, sebagaimana dijabat sebelumnya. Karena sebelumnya menjabat JPT pratama/eselon 2, maka Mudana tak lagi harus ikut le-

lang, seperti pejabat lain yang menginginkan jabatan eselon 2. Hanya saja, Bupati mengaku tak lagi memberikan Mudana bertugas sebagai Kadis PMPPTSP Gianyar. Menurut Bupati, penempatan Mudana di luar Dinas PM-PPTSP agar masyarakat tak menilai, orang bermasalah dikembalikan ke posisi semula atau saat terjadi kasus OTT. Karena di mata masyarakat awam akan menilai jelek jika Mudana dikembalikan ke tempat semula. "Kami jaga perasaan rakyat. Ini masalah rasa. Walaupun secara hukum yang bersang-

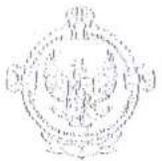
kutan tak terbukti bersalah," jelasnya. Pasca SP3 kasusnya terbit, pejabat asal Kelurahan Samplangan, Gianyar ini menjadi staf dan hanya bergaji 80 persen.

Sebelumnya, Tim Satgas Counter Transnational dan Organized Crime (CTOC), Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali melakukan OTT di Kantor Dinas PMPPTSP Gianyar, Senin, 12 Juni 2017. OTT berdasarkan laporan dugaan pungli terkait pengurusan Tanda Daftar Usaha Panwisata (TDUP) Nomor 503 / 065 / DPMPPTSP / PW / 2017, milik I Putu Suasta yang

diajukan oleh Dewa Nyoman Oka Trisandi di kantor tersebut. Petugas melakukan OTT di ruang Kabid Perijinan B, I Nyoman Sukarja. Tim menemukan barang bukti uang tunai Rp 14.450.000. Tak hanya Sukarja, polisi juga menetapkan Kadis PM-PPTSP Gianyar Mudana sebagai tersangka dengan dugaan pungli yang dilalukan Sukarja atas perintah Mudana. Dalam proses hukum di Pengadilan Tipikor Denpasar, Sukarja dijatuhi vonis, Rabu, 25 Januari 2018, berupa denda Rp 50 juta, subsidi lima bulan kurungan. **Isa**

Edisi : Selasa, 12-2-2019

Hal : 6



## Terima BPK, Bupati Artha Minta OPD Kooperatif



• NUSABALI/IB DIWANGKARA

BUPATI Jembrana I Putu Artha menerima entry meeting tim pemeriksa BPK, di Ruang VIP Bupati Jembrana, Senin (11/2).

NEGARA, NusaBali

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar entry meeting dengan Bupati Jembrana I Putu Artha, Senin (11/2). Pertemuan di Ruang VIP Bupati Jembrana, itu berkenaan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jembrana tahun anggaran (TA) 2018.

Ketua Tim Pemeriksa Irfan Kusuma, mengatakan dia bersama timnya akan melakukan pemeriksaan selama 30 hari kerja di Jembrana. Untuk mem-

perlancar pemeriksaan, dia mengharapkan kerja sama dari jajaran OPD Pemkab Jembrana. "Pemeriksaan kami lakukan bertahap. Mulai dari pendahuluan hingga pemeriksaan terperinci. Kami mohon dukungan dari Pemkab untuk data dan dokumen di masing-masing OPD," ungkap Irfan Kusuma, didampingi tiga orang anggotanya.

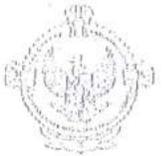
Sementara Bupati Artha memastikan dukungan terhadap pemeriksaan BPK yang menjadi bagian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

ini. Pihaknya pun mengimbau kepada para kepala OPD kooperatif dalam mengikuti pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. Begitu juga dalam pemeriksaan nanti, para kepala OPD diharapkan tidak ragu untuk berkonsultasi menyangkut laporan keuangan.

Bupati Artha menambahkan, sesuai dengan pesan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin saat menerima rapor SAKIP di Banjarmasin, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah diminta lebih matang dalam melakukan perencanaan dan matang dalam menggunakan anggaran untuk masyarakat. "Imbauan tersebut tentunya harus disikapi juga dengan melakukan pertanggungjawaban atau pelaporan yang baik. Saya berharap semua kepala OPD serius dalam menjalankannya," tutur Bupati Artha, yang didampingi Plt Asisten II Sekda I Gusti Ngurah Sumber Wijaya, Inspektur Ni Wayan Koriani, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Dewa Gde Kusuma Antara. **ode**

Edisi : Selasa, 12-2-2019

Hal : 7



## Tim BPK RI Lakukan Pemeriksaan LKPD Tabanan



BUPATI Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menerima tim BPK yang melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Senin (11/2).

### TABANAN, NusaBali

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi Sekda Kabupaten Tabanan I Gede Susila serta sejumlah OPD terkait, menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Bali yang dipimpin Donny Ramli di ruang kerja bupati, Senin (11/2).

Kedatangan tim BPK RI Provinsi Bali dalam rangka melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 Pemkab Tabanan dan entitas terkait lainnya.

Donny Ramli saat bertemu Bupati Eka mengatakan timnya ke Tabanan akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari, dimulai dari Senin (11/2). Pemeriksaan ini sesuai dengan surat tugas No 31/ST/XIX.DPS/02/2019 tanggal 6 Februari 2019. "Kami akan melaksanakan tugas pemeriksaan selama 30 hari. Pemeriksaan tersebut dimulai 11 Februari 2019 dan akan berakhir 12 Maret 2019," jelasnya.

Terkait itu, pihaknya membutuhkan dokumen terlampir, sedangkan dokumen lainnya yang belum tercantum dalam surat ini akan dimintakan kemudian dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pihaknya tak lupa meminta kerja sama dan koordinasi semua pihak.

"Kami berharap dukungan dan kerjasama dari Pemkab Tabanan dan OPD terkait agar pekerjaan kami bisa berjalan dengan lancar. Jika ada masalah bisa disampaikan, ingat jangan takut kepada BPK, karena kami juga memiliki fungsi melakukan pembinaan secara umum," tutur Donny.

Bupati Eka mengajak seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan agar berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, serta mempersiapkan segala hal dan dokumen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan. "Lakukan komunikasi dan koordinasi serta siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga pemeriksaan LKPD dapat berjalan den-

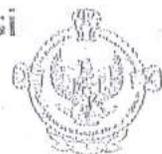
gan lancar. Saya minta agar para OPD terkait untuk mengawal entry ini agar dokumen yang diperlukan bisa tepat waktu dan lengkap," pinta Bupati Eka.

Bupati Eka juga menjelaskan, pemeriksaan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini agar selalu memiliki proses kemajuan. Sehingga Kabupaten Tabanan bisa selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Jangan sampai kita terlena atas hasil yang didapat. Berbuat itu gampang tapi mempertahankan yang sulit. Jangan bangga jadi juara, tapi jadilah juara yang bisa konsisten. Tetap jadi baris terdepan dengan membina, melatih team work. Kita pernah jatuh, dan jangan sampai jatuh lagi ke opini disclaimer," tegasnya.

Melalui entry meeting ini, Bupati Eka berharap tim dari BPK perwakilan Bali tetap menuntun seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, dan intens melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihaknya. "Saya harapkan terus tuntunan, komunikasi, koordinasi terhadap kami di Tabanan. Jangan pernah capek ngajarin kami, ngomelin kami, serta mengkritik kami. Karena dalam berbuat menuju yang lebih baik, perlu output kritik. Maka dari itu, kami siap untuk dikritik, untuk berbenah menjadi yang lebih baik. Maka dari itu harus ada komunikasi dua arah," harapnya.

Bupati Eka menambahkan, seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan jangan takut bertanya kepada tim BPK. Sehingga nantinya bisa meminimalisir kesalahan dan membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi dan bisa dipertanggung-jawabkan.

"Jangan takut bertanya. Kapan lagi bisa bertanya. Tanya semua hal yang bertujuan dan bisa memperbaiki laporan keuangan kita. Dan tentunya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang benar, sehingga kita bisa selalu konsisten dari tahun ke tahun," tandasnya. ☺ de



## KASUS OTT

### Kadis Tersangka OTT Di-SP3

**GIANYAR**— Ketut Mudana, 48, tersangka yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) rupanya dinyatakan bebas. Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMSP) Gianyar itu memperoleh Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dari Polda Bali. Turunnya SP3 sempat dipertanyakan DPRD Gianyar dalam sidang paripurna, Senin (11/2).

Dalam pandangan fraksi Gerindra DPRD Gianyar yang dibacakan Sekretaris Fraksi, Ida Bagus Nyoman Rai mempertanyakan turunnya SP3 terhadap Ketut Mudana. "Dengan di SP3-nya saudara Ketut Mudana, apa kebijakan saudara bupati terhadap yang bersangkutan?" tanya Ida Bagus Nyoman Rai dihadapan sidang paripurna yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), undangan dan bupati Gianyar. Usai sidang, kepada koran ini Gus Rai -sapaan akrabnya mempertanyakan SP3 itu mengingat kasusnya sudah menjadi perhatian publik. "Apapun alasannya, yang bersangkutan moral dan etika, masyarakat sudah terlanjur melihat itu," ucapnya.

Kata dia, SP3 ini menyangkut rasa keadilan masyarakat dan moralitas di tengah masyarakat. "Kami inginkan yang terbaik. Kalau memang tidak terbukti, bagaimana status pegawainya? Apa mau dikembalikan atau bagaimana? Ini berkaitan dengan rasa," kata politisi asal Kecamatan Gianyar itu.

Sementara itu, bupati Gianyar Made Mahayatra mengakui Mudana sudah menerima SP3. "SP3 artinya sudah dihentikan penyidikannya. Maka statusnya seperti semula, sebagai PNS," jelasnya.

Selama proses hukum berlangsung, pasca-OTT Mudana dirumahkan namun tetap memperoleh gaji sebesar 80 persen. "Dia belum saya aktifkan sebagai PNS. Kalau sekarang diaktifkan, maka seolah-olah dia tidak pernah melakukan apa yang pernah dia lalui dulu (menjadi pejabat, Red)," ucapnya.

Lalu dimana Mudana ditempatkan? Pada saat mutasi nanti, bupati akan kembali menempatkan Mudana sebagai pejabat eselon II. "Nanti menunggu waktu, begitu Pansel (Panitia Seleksi, Red) selesai. Dia dilantik di eselon II tetap, yang jelas bukan di Dinas Perizinan lagi. Saya sudah bertanya," terangnya.

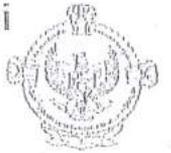
Mengenai waktu penempatan, bupati akan menunggu waktu sesuai aturan. "Secara aturan bupati baru bisa melakukan mutasi setelah 6 bulan menjabat. Ya, nantilah," tukasnya.

Diberitakan *Jawa Pos Radar Bali* sebelumnya, Polda Bali melakukan OTT di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMSP) Kabupaten Gianyar pada Jumat 16 Juni 2017. Awalnya polisi menangkap Kabid Perizinan I Nyoman Sukarja karena menyalahi wewenang dengan memeras pemohon izin. Sukarja memeras pengusaha sebesar Rp 15 juta lewat kertas berkode 15 dengan stempel dinas.

Tak sampai sehari pascapenangkapan Sukarja, I Ketut Mudana ikut ditetapkan sebagai tersangka. Baik Sukarja dan Mudana sempat dirilis oleh Polda Bali sebagai tersangka kasus OTT. Namun, hanya berkas Sukarja yang naik ke meja hijau. Sukarja yang telah divonis kini sudah bebas dan berhenti sebagai PNS. (dra/dot)

Edisi : Selasa, 12, Feb, 2019

Hal. : 2



# Pemkab Jembrana Hapus Aset Mangkrak

**NEGARA** - Sejumlah aset milik pemerintah Kabupaten Jembrana ternyata banyak mangkrak. Bahkan beberapa aset sudah mangkrak bertahun-tahun. Juga ada aset mendapat opini *disclaimer* atau Tidak Menyatakan Pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, DPRD Jembrana menyarankan penghapusan aset yang mangkrak dan memanfaatkan aset yang sekiranya masih di manfaatkan.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Jembrana

I Nyoman Sutengsu Kusumayasa. Menurutnya, aset Pemerintah Kabupaten Jembrana cukup banyak yang tidak dimanfaatkan, seperti aset dengan nilai cukup besar mesin pengolahan kompos yang saat ini berada di gudang tempat pembuangan akhir (TPA) Peh. Serta aset mesin megumi yang juga tidak dimanfaatkan, padahal mesin untuk pengolahan air laut menjadi air minum tersebut nilainya miliaran rupiah. "Sangat disayangkan, aset besar

tapi tidak dimanfaatkan," terangnya, kemarin (11/2).

Menurutnya, khusus mengenai aset megumi sebelumnya diserahkan perusahaan daerah (Perusda) Jembrana untuk dikelola dalam keadaan mesin rusak. Sehingga menjadi beban dari Perusda Jembrana, padahal mesin tidak bisa digunakan. Semestinya, Perusda Jembrana mengusulkan untuk evaluasi aset.

Menurut politisi PDIP ini, penghapusan aset-aset tersebut sebenarnya mudah

dilakukan. Karena aset tidak bermanfaat lagi, tersebut milik pemerintah "Kalau tidak produktif lagi, kabupaten, apabila tidak lebih baik diputihkan," mungkin bisa dikelola dan tegasnya.

asetnya tidak produktif. Selain aset kompos dan semestinya dihapus megumi. Suheng juga dengan cara dan aturan menyarankan agar aset-penghapusan yang sudah aset lain berupa bangunan ada. "Tidak susah kalau ada yang sebelumnya untuk kemauan," ungkapnya. rumah dinas, tetapi

Karena modal untuk tidak dimanfaatkan agar penghapusan sudah ada, dimanfaatkan misalnya yakni aset seperti megumi untuk guest house. Saat sudah tidak bisa dikelola ini, aset bangunan tersebut oleh Perusda Jembrana hanya jadi beban daerah daripada, saat ini masih jadi untuk pemeliharaan, beban perusda. Termasuk padahal tidak digunakan. mesin kompos yang sudah (bas/dit)



FOTO M. BASIR/RADAR BALI

**DIBIARKAN:** Aset pengolahan kompos yang ada di TPA Peh, mangkrak bertahun-tahun

Edisi : Selasa, 12, Feb, 2019

Hal. : 7